

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

JURNAL

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Azisia Pancapuri

NIM : 0710113078



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI
PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

Identitas Penulis :

a. Nama : Azisia Pancapuri

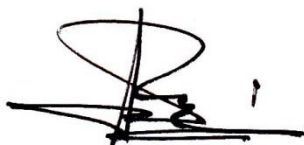
b. Nim : 0710113078

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 16 Desember 2013

Pembimbing Utama



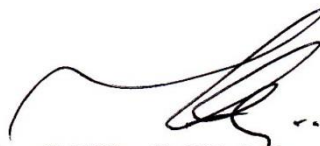
Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH., Mhum
NIP.1060081 019860 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., Mhum.
NIP.1060081 019860 1 002

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

Azisia Pancapuri
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Email : hukum@ub.ac.id

ABSTRAKSI

Azisia Pancapuri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Februari 2014, *“EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEBKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)”*, Agus Yulianto, SH.MH., Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Efektifitas, Cukai Hasil TEBKAU, Perusahaan Rokok

Penulisan skripsi membahas tentang Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil TEBKAU Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang dilatarbelakangi Peningkatan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai. Kenaikan tarif rokok mencapai 15% sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sangat tidak adil jika tarif rokok pada perusahaan rokok besar dengan perusahaan rokok kecil disamakan, pada pabrik rokok besar kenaikan hanya mencapai 7% sedangkan di pabrik rokok kecil ada yang mencapai 63% kenaikannya.

Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara, Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara serta langkah-langkah yang dilakukan DJBC dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan efektifitas kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Metode sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, 2) Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II, 3) Staff yang terkait dengan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II

Perusahaan-Perusahaan rokok.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dirasa kurang efektif karena dilihat dari empat teori efektifitas yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hanya dari faktor sarana dan prasarana saja yang cukup efektif. Ketiga faktor yang lain masih belum efektif. Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara yaitu Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai, Beredarnya Cukai Illegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah Sosialisasi, Penindakan terhadap Cukai Illegal dan rokok tanpa cukai, Audit Perusahaan Rokok, Pengawasan.

ABSTRACT

Azisia Pancapuri , Administrative Law , Faculty of Law , University of Brawijaya , February 2014 , " EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF TOBACCO EXCISE TARIFF INCREASE REVENUE AS collector BY ARTICLE 5 OF THE FINANCIAL LAW NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING THE EXCISE (Studies in East Java Regional Office DJBC II) " , Agus Yulianto , SH.MH. , Lutfi Efendi , SH , M. Hum .

Keywords : Effectiveness , Excise Tobacco , Cigarette Company

Effectiveness thesis discusses the application of Tobacco Excise Tariff Increase In State Financial Acceptance Grouper According to Article 5 of Law No. 39 of 2007 on Excise , which motivated memimbulkkan Raising tax rates is a negative impact on employers of goods subject to excise or manufacturers of goods subject to excise . The increase in smoking rates reached 15 % very detrimental to the existing cigarette manufacturers especially cigarette factories in the city of Malang . Very unfair if smoking rates in the major tobacco companies equated with small tobacco companies , the large increase in the cigarette factory only reaches 7 % , while in the small cigarette factory , reaches a 63 % increase .

So the authors conducted a study of the effectiveness of the implementation of the increase in tobacco excise rates conducted by the Director General of Customs and Excise as a collector of state financial receipts , factors that can inhibit the Director General of Customs and Excise in the effective implementation of tobacco excise rate increase as the collector of the State 's financial receipts and step all efforts to address the factors inhibiting DJBC effective implementation of tobacco excise rate increase as the collector of state revenue .

In this study , the writer used socio-juridical approach is to study the problems of normative legal aspects , namely Article 5 of Law Number 39 Year 2007 on Customs Tariff attributed to the fact that there are in the field with regard to the effectiveness of the increase in tobacco excise rates . Sample method used in this study is purposive sampling is non- random sample withdrawal is done by selecting or taking subjects based on specific goals , As for the samples in this study were 1) Head of the East Java Regional Office DGCE II , 2) Head of Customs and Excise East Java Regional Office II , 3) Staff associated with the Customs and Excise Office of East Java II

Latar Belakang Masalah

Era reformasi terus bergerak hingga hari ini, termasuk menyangkut pengelolaan keuangan negara. Terjadinya permasalahan keuangan negara dewasa ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita jawab bersama. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Oleh sebab itu, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Filosofis negara dan pemerintah yang diadakan tidak untuk dirinya sendiri harus menjadi pegangan dalam menciptakan hukum keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan bersama¹. Maka negara tersebut dapat mencapai cita-citanya.

Tugas rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan luar negeri. Penerimaan rutin negara yang mebiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain hasil perusahaan-perusahaan negara, denda-denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pungutan-pungutan berupa pajak.

Pembedaan penerimaan negara yang berasal dari pajak dengan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak didasarkan atas peranan perpajakan yang makin penting dalam keuangan negara. Apalagi pada masa-masa sekarang ini pajak menjadi sektor utama dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya

¹ Adrian Sutedi, 2012. **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

untuk pengeluaran rutin negara². Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa pajak itu merupakan jiwa negara, artinya tanpa pajak negara akan lumpuh karena hampir semua negara yang ada di dunia mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak.

Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya dana yang dipakai untuk pembangunan. Semakin maju sebuah negara maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga semakin tinggi, karena dengan membayar pajak maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan terpenuhi. Sektor pajak merupakan sektor pemasukan negara yang tidak tergantung secara langsung pada kondisi pasar yang ada. Di Indonesia pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi roda pemerintahan yang ada, hal ini dapat dilihat dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dalam undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat³. Dalam APBN tersebut salah satu pemasukan terdapat dari bea masuk dan bea keluar serta pengenaan tarif cukai. Pemberian bea masuk dan bea keluar serta tarif cukai ini dibuat oleh departemen keuangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan DJBC.

² Tunggal Anshari, 2008. **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, hlm. 4

³ Joko Winarto, **APBN DAN APBD**, (<http://www.slideshare.net/mohamadbahrul/apbn-dan-apbd>), diakses tanggal 12 Agustus 2013

Hubungan antara pajak Negara yang dipungut oleh Dirjen Pajak dan kewajiban bea masuk/bea keluar dan cukai yang dipungut oleh DJBC saling berkaitan erat. Istilah kewajiban dalam pajak dikenakan terhadap individu, sedangkan pabean dan cukai dikenakan terhadap aktivitas memasukkan atau mengeluarkan barang atau transaksi keuangan dari atau ke luar Negeri yang tidak bersifat individual. Selain itu ketentuan perundang-undangan yang ada selalu menjadi landasan pijak bagi dilaksanakannya pungutan pajak atau pabaen dan cukai.

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Sedangkan yang dimaksud objek cukai adalah⁴ :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya

⁴M Zulhunain Fahmi. **Konsep Cukai**, (<http://zulhunain.blogspot.com/2012/06/konsep-cukai.html>), diakses tanggal 12 Agustus 2013

- b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam penulisan ini yang difokuskan adalah mengenai objek cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut Staatsblad No. 517 Tahun 1932, Staatsblad No. 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad No. 234 Tahun 1949 tentang "Tabaksaccijns-Ordonnantie" dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda⁵. Beralih ke masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 cukai tembakau diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau. Penetapan dalam peraturan ini mengatur tentang Harga Jual Eceran (HJE), pemungutan cukai yang diturunkan, dan penetapan golongan-golongan pengusaha. Dan akhirnya pada masa reformasi ditetapkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dan

⁵<http://usu.ac.id> diakses tanggal 11 Agustus 2013

sekarang ini Undang-Undang No. 11 tahun 1995 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2007.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan DJBC, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara⁶ dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia. Selain itu tugas utama DJBC adalah mengawasi peredaran barang kena cukai atau minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya⁷.

Dan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak⁸.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan cukai sudah melebihi 50 persen pada semester pertama tahun 2013 atau sebesar Rp 52,6 triliun. Sebanyak 96 persen dari capaian itu berasal dari cukai rokok yang nilainya mencapai Rp 50,5 triliun. Realisasi ini sudah memenuhi 30 persen total target

⁶ UU No. 39 Tahun 2007

⁷ <http://www.beacukai.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2013

⁸ Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 179/PMK.011/2012

penerimaan direktorat ini yaitu sebesar Rp 153,2 triliun hingga akhir tahun. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susi Wijono Moegiarso menyebutkan penerimaan Cukai sampai dengan 28 Juni 2013 sebesar Rp 52,6 triliun atau 50,24 persen dari target tahunan Bea Masuk APBN-P 2013 sebesar Rp 104,7 triliun. Realisasi penerimaan cukai tersebut senilai 102,4 persen dari target proporsional sampai dengan 28 Juni 2013 yang sebesar Rp 51,3 triliun.⁹

Penaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai. Oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

Kenaikan tarif rokok mencapai 15% sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sangat tidak adil jika tarif rokok pada perusahaan rokok besar dengan perusahaan rokok kecil disamakan, pada pabrik rokok besar kenaikan hanya mencapai 7% sedangkan di pabrik rokok kecil ada yang mencapai 63% kenaikannya. Jika begini maka pabrik rokok kecil tidak akan mampu bersaing dengan pabrik rokok besar. Dan seiring berjalannya waktu pabrik-pabrik rokok kecil sekarang sudah mulai

⁹<http://www.malang-post.com/ekonomibisnis/69850-cukai-rokok-hasilkan-rp-50t>, diakses tanggal 4 Oktober 2013

menurun hasil produksinya sejak pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai.

Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dikatakan bahwa:

- “(1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:*
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:*
 - 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau*
 - 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*
 - b. untuk yang diimpor:*
 - 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau*
 - 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*
- (2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:*
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:*
 - 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau*
 - 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*
 - b. untuk yang diimpor:*
 - 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau*
 - 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*
- (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah*

untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

- (4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.”*

Berdasarkan permasalahan di atas sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana **“EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”** sebagai bahan permasalahan Laporan Penelitian yang dikaji di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.

Permasalahan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam Laporan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.
2. Faktor apa saja yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.

3. Langkah-langkah apa yang dilakukan DJBC dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapankenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan efektifitas kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Metode sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu, Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,
2. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II,
3. Staff yang terkait dengan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II,
4. Perusahaan-Perusahaan rokok

Hasil dan Pembahasan

A. Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai

Siapa yang tak kenal dengan tembakau, tentu saja tembakau akrab di dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan tembakau sempat dijuluki “si emas hijau”, karena tembakau pernah menjadi penghasil devisa Negara terbesar dari

sektor non migas. Dari sektor tembakau ini pulalah yang dapat menyerap tenaga kerja bahkan sampai ribuan orang menggantungkan nasibnya dari bekerja disektor tembakau baik menjadi buruh melalui pabrik-pabrik rokok maupun menjadi petani dan buruh-buruh pertanian tembakau. Sehingga ini membuat penentu kebijakan untuk mengatur Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya untuk menghimpun penerimaan keuangan Negara dari sektor tembakau.

Pada tahun 2012 yang lalu, cukai mampu memberikan kontribusi sekitar 84,67 trilyun rupiah atau 110% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2013 ini penerimaan cukai ditargetkan akan mencapai 88,02 trilyun rupiah. Dari nilai tersebut, 85 trilyun rupiah diestimasikan akan berasal dari cukai hasil tembakau.¹⁰

Salah satu fungsi cukai hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan masyarakat secara nasional maupun internasional menghendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan ini berasal dari forum Internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan dalam *Framework Convention on Tobacco control* (FCTC) pada tahun 2003 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi yang digagas oleh *World Health Organization* tersebut, namun kebijakan pemerintah terkait cukai hasil tembakau juga telah mengadopsi rekomendasi FCTC tersebut.¹¹

¹⁰Surono. **Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2013 :Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau**, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013 hal. 1

¹¹*Ibid.* hal. 3

Sistem tarif cukai hasil tembakau yang diimplementasikan di Indonesia pada dasarnya mensinergikan beberapa kepentingan yang berbeda. Hal ini lah yang membuat, struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi agak kompleks dan tidak sederhana. Kondisi seperti ini tidaklah cocok dengan prinsip administrasi perpajakan yang dituntut untuk sederhana. Kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2013 juga telah mengarah pada penyederhanaan struktur tarif cukai, walaupun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan moderat.¹²

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini menimbulkan beragam persoalan bagi produsen rokok di Malang mulai dari ongkos produksi sampai biaya tenaga kerja. Dampak dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat dirasakan terutama oleh produsen-produsen rokok terutama produsen rokok skala kecil, untuk itu penulis akan menganalisa Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai.

Berbicara masalah efektifitas penegakan hukum ada empat hal yang harus diperhatikan sebagaimana telah di ulas dalam Bab sebelumnya yaitu substansi, struktur, budaya serta sarana dan pra sarana. Keempat-empatnya ini penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea Dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai.

¹²*ibid*

1. Substansi Hukum

Berbicara masalah Kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2013 ini, berarti kita harus berbicara tentang substansi aturan perundang-undangan yang mengatur kenaikan tariff cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau Tahun 2013 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai. Maka kita harus melihat sejauh mana efektivitas Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai jika dilihat dari Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau, salah satu dari Peraturan Keuangan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau, apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dan juga bagaimanakah optimalisasi pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai yang sudah diturunkan di dalam Peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif cukai hasil tembakau salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau terutama bagi produsen rokok di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yaitu di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) .

Mengingat dominasi penerimaan cukai hasil tembakau dibanding pungutan cukai lainnya, wajar saja apabila konsentrasi terhadap kebijakan cukai HT ini terlebih lebih intensif. Sejak tahun 2001 pemerintah secara reguler menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap akhir tahun. Hampir dapat dikatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau akan selalu naik setiap tahunnya.¹³

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada dua komponen tarif cukai hasil tembakau yang diatur tentang kenaikannya yang pertama adalah komponen cukai hasil tembakau untuk yang dibuat di Indonesia dan komponen cukai hasil tembakau untuk yang diimpor.

Dari sejak pelaksanaannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada tiga macam cara dalam menaikkan tariff cukai hasil tembakau menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai¹⁴ cara pertama adalah *advolareum*, kedua adalah spesifik dan ketiga adalah cara gabungan. Untuk sebelum tahun 2013 model penentuan tarif cukai hasil tembakau menggunakan model gabungan yaitu *advolarum* dan tarif spesifik. Di tahun 2013 ini kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau ini menggunakan cara spesifik.

Kelebihan sistem *advolarum* sistem ini sesuai dengan sektor tembakau Indonesia yang heterogen, pembedaan tarif antara produsen rokok besar dan kecil, kelemahan dari sistem ini pemerintah yang menguasai pasar dengan sistem HJE

¹³*Ibid.* hal. 1

¹⁴Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

(Harga Jual Eceran). Jika sistem spesifik pemerintah tidak perlu menerapkan harga dasar, hanya cukup mengatur besaran cukai dalam barang kena cukai yang digunakan per batang, lebih mudah juga digunakan perbatang, lebih mudah juga dalam pengawasan. Kelemahan sistem spesifik adalah tarif cukai antara pabrik besar dan kecil disamakan sehingga pabrik kecil susah bersaing.¹⁵

Produsen Rokok tadi masih dilakukan penggolongan dan dari penggolongan tersebut didasarkan pada batasan produksi rokok yang mereka lakukan. Pembagian golongan pada produsen rokok pertama kali diterapkan setelah lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.¹⁶

Tabel 4.1

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Pabrik
a.	SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
b.	SPM (Sigaret Putih Mesin)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
c.	SKT (Sigaret Kretek Tangan)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	A. Lebih dari 6 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
			B. Tidak lebih dari 6 juta batang
d.	KLM (Sigaret	I	Lebih dari 6 juta batang

¹⁵*ibid*

¹⁶*ibid*

	Kelembak Kemenyan), KLB (Rokok Daun atau Klobot) Atau SPT (Sigaret Putih Tangan)	II	Tidak lebih dari 6 juta batang
e.	TIS (Tembakau iris)	I	Lebih dari 2 milyar gram
		II	Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram
		III	A. Lebih dari 50 juta gram tetapi tidak lebih dari 500 juta gram
			B. Tidak lebih dari 50 juta gram
f.	CRT (cerutu)	Tanpa Golongan	Tanpa Batasan Produksi
g.	HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya)	Tanpa Golongan	Tanpa Batasan Produksi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005

Penggolongan ini juga mengalami perubahan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Tabel 4.2

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	
1.	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak Lebih dari 300 juta batang
4.	SKTF (Sigaret	I	Lebih dari 2 milyar batang

	Kretek Tanpa Filter) atau SPTF (sigaret Putih Tanpa Filter)	II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ada penghapusan golongan III pada SKM dan SPM, Penghapusan Golongan pada KLM dan TIS, serta ada jenis varian rokok baru yaitu SKTF (Sigaret Kretek Tanpa Filter) atau SPTF (sigaret Putih Tanpa Filter).

Berbicara masalah kenaikan Tariff Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menurut penulis sudah seharusnya kenaikan tariff cukai tidak serta merta naik tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat salah satunya perusahaan produsen tembakau, karena sudah jelas bahwa di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dikatakan bahwa:

“Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan

Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.”

Aspirasi pelaku usaha industri menjadi penting dalam kenaikan tarif cukai karena jika pemerintah salah membuat kebijakan tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau maka berakibat pada banyaknya industri tembakau yang mengalami pailit sehingga akan terjadi pengurangan tenaga kerja secara massal melalui Pemutusan Hubungan Kerja dan tentu saja itu berakibat bertambahnya jumlah pengangguran yang ada. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (FORMASI) Malang¹⁷ menurutnya adalah

“Pabrik rokok skala besar maupun skala kecil sama-sama mengalami kerugian dengan perubahan tarif cukai menjadi tarif cukai spesifik. Apalagi setiap tahunnya pemerintahan terus menaikkan target pemasukan keuangan negara dari tarif cukai. Terbukti sampai 2013 ini sudah banyak pabrik rokok yang gulung tikar karena kerugian besar. Selain itu untuk menutup kerugian maka pengurangan pegawai juga dilakukan oleh pabrik rokok.”

Maka apabila dikaji Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai kurang efektif dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Menteri Keuangan mengindahkan aspirasi pelaku usaha industri. Apalagi ternyata kenaikan tarif cukai gabungan menjadi tarif cukai spesifik pada kenaikan tarif cukai 2013 ini berakibat kerugian pada perusahaan industri tembakau.

Kenaikan Tarif Cukai dari Tahun 2011-2013 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

¹⁷Hasil Wawancara dengan Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang, tanggal 10 November 2013

Tabel 4.3

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2011

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan harga jual eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 245
			Lebih dari Rp 380 Sampai dengan 430	Rp. 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 170
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 600	Rp. 325
			Lebih dari Rp 450 Sampai dengan 600	Rp. 295
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp. 245
		II	Lebih dari Rp 300	Rp. 215
			Lebih dari Rp 254 Sampai dengan 300	Rp. 175
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp. 110
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp. 235
			Lebih dari Rp 550 Sampai dengan 590	Rp. 180
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp. 155
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 110
			Lebih dari Rp 349 Sampai dengan 379	Rp. 100
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 90
4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 234	Rp. 65
			Lebih dari Rp 660	Rp. 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 245

			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp. 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 170
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 21
			Lebih dari Rp 149 Sampai dengan 250	Rp. 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp. 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp. 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 17
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Tabel 4.4

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2012

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan harga jual eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 325
		II	Lebih dari 430	Rp. 270

			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp. 235
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 375	Rp. 365
			Lebih dari Rp 300	Rp. 235
		II	Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp. 190
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp. 125
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 590	Rp. 255
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 590	Rp. 195
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 125
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp. 115
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 105
		III	Paling Rendah Rp 234	Rp. 75
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 325
		II	Lebih dari 430	Rp. 270
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp. 235
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 21
			Lebih dari Rp 149 Sampai dengan 250	Rp. 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp. 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp. 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 17
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250

9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100
----	-------------	-----------------------	----------------------	---------

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Tabel 4.5

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2013

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Harga Jual Eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 669	Rp. 375
			Paling rendah Rp 631,00 sampai dengan Rp 669,00	Rp. 355
		II	Lebih dari Rp 549	Rp. 285
			Paling rendah Rp 440 sampai dengan Rp 549	Rp. 245
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 680	Rp. 380
		II	Lebih dari Rp 444	Rp. 245
			Paling rendah Rp 345 sampai dengan Rp 444	Rp. 195
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 749	Rp. 275
			Paling rendah Rp 550 sampai dengan Rp 749	Rp. 205
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 130
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp. 120
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 110
		III	Paling rendah Rp 250	Rp. 80
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 669	Rp. 375
			Paling rendah Rp 631 sampai dengan Rp 669	Rp. 355
		II	Lebih dari Rp 549	Rp. 285
			Paling rendah Rp 440 sampai dengan Rp 549	Rp. 245
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 260	Rp. 25
			Lebih dari Rp 160 sampai dengan Rp 260	Rp. 20
			Paling rendah Rp 50 sampai dengan Rp 160	Rp. 5

6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 260	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 260	Rp. 20
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 20
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 180.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 180.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 450 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Dari tabel 4.3, 4.4, 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Tarif Cukai perbatang atau pergram mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu dikarenakan pemerintah memberikan target pemasukan pajak melalui penerimaan cukai harus naik setiap tahunnya. Dan kenaikan tarif cukai tersebut sangat merugikan bagi produsen rokok terutama produsen rokok skala kecil.

2. Struktur Hukum

Dalam konteks efektifitas penegakan hukum, maka struktur hukum menjadi hal yang penting, karena struktur hukum dalam hal ini adalah penegak hukum adalah instrument pelaksana dari sebuah peraturan perundang-undangan. Maka optimalisasi penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menurut penulis menjadi efektif ketika ada ketegasan dari aparaturnya penegak hukum khususnya peranan bea dan cukai di dalam mengontrol pelaksanaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam menegakkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai yang berkaitan dengan kenaikan tarif Cukai Hasil tembakau menurut Janus Siahaan Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II¹⁸ adalah berupa membuat aturan dari Dirjen Bea Cukai tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai turunan dari Peraturan-peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Disamping membuat aturan yang berkaitan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Bea Cukai melakukan pengawasan kepada seluruh pabrik rokok secara berkala. Bea cukai juga melakukan audit di kantor pelayanan bea dan cukai. Tujuan audit sendiri adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha tembakau dalam pelaksanaan undang-undang cukai dan peraturan pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan di wilayah pedalaman Jawa Timur, contoh: pada tanggal 11 September 2013 ke Dusun Tambak Rejo, Sendang Biru. Isi sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat tidak membeli cukai ilegal.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

Namun hal itu disanggah oleh Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (FORMASI) Malang¹⁹ menurutnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau menyebabkan banyaknya cukai ilegal yang beredar di masyarakat, bahkan ada rokok tanpa cukai yang tentu saja ini merugikan Negara, peranan para penegak hukum terhadap peredaran cukai ilegal dan rokok tanpa cukai masih belum maksimal, karena pengawasannya tidak sampai ke daerah pelosok-pelosok, ini adalah merupakan bentuk penyiasatan produsen rokok untuk menyiasati kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Dan tentu saja peredaran cukai ilegal dan rokok tanpa cukai tidak hanya merugikan Negara melainkan juga merugikan para pengusaha rokok yang sudah membeli cukai dari kantor bea dan cukai wilayah Jawa Timur II.

Depkeu juga melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok namun tidak menyeluruh dan tidak berkala. Jika Depkeu menemukan suatu pelanggaran maka depkeu melakukan penyerahan atas dugaan pelanggaran cukai kepada Bea dan Cukai. Lalu Bea dan Cukai yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti ada pelanggaran maka Bea dan Cukai yang membuat berita acara mengenai terjadinya tindak pidana cukai.²⁰

Jika dilihat dari hal tersebut maka efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara sebagai pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai

¹⁹Hasil Wawancara dengan Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang, tanggal 10 November 2013

²⁰Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

menjadi kurang efektif karena beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai yang luput dari pengawasan Dirjen Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur II menyebabkan tidak optimalnya penerimaan keuangan Negara dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

3. Budaya Hukum

Faktor selanjutnya di dalam efektivitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah Faktor Budaya Hukum, budaya hukum disini adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat disini selain Masyarakat Industri Rokok dan konsumen.

Maka jika berbicara budaya hukum dari sisi Masyarakat Industri Rokok, menurut penulis efektivitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara menjadi kurang optimal karena kenaikan tarif cukai hasil tembakau berakibat kepada tutupnya beberapa perusahaan rokok karena mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan tarif Industri Rokok seperti yang diungkapkan oleh Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang bahwa Pabrik rokok skala besar maupun skala kecil sama-sama mengalami kerugian dengan perubahan tarif cukai menjadi tarif cukai spesifik. Apalagi setiap tahunnya pemerintahan terus menaikkan target pemasukan keuangan negara dari tarif cukai. Terbukti sampai 2013 ini sudah banyak pabrik rokok yang gulung tikar karena kerugian besar.

Disamping itu beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai mengakibatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai juga kurang efektif karena ada budaya ketidakpatuhan dan melanggar ketentuan yang ada yaitu dengan menjual cukai ilegal dan rokok tanpa cukai.

Ditingkatan masyarakat menjadi kurang efektif pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikarenakan masih adanya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai dan ketidaktahuan mereka tentang rokok yang menggunakan cukai ilegal. Karena menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II bahwa Bea dan Cukai tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara terus menerus karena terlalu banyak produsen cukai.²¹

4. Sarana dan Prasarana

Faktor Efektifitas yang terakhir adalah berkaitan dengan Sarana prasarana Di dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada sarana prasarana yang dapat dinikmati oleh produsen rokok yaitu:

1. Terdapat layanan mandiri bagi pengusaha rokok untuk dapat mengetahui batasan tarif HJE.
2. Penyuluhan dan layanan informasi untuk sosialisasi dan audit Produsen Rokok oleh Bea dan Cukai.

²¹Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

3. SDM profesional yang sudah melewati tahap tes menjadi pegawai negeri sipil bea dan cukai. Pegawai juga melakukan kegiatan *capacity building* secara rutin agar SDM menjadi unggul, kelompok umur pegawai di bea cukai lebih banyak pada umur 31-40 dan paling sedikit pada umur 51-55.
4. Bea cukai juga menyediakan pita cukai di setiap kantor wilayah bea dan cukai.
5. Reward bagi pengusaha yang sudah mematuhi aturan cukai yang baru adalah peningkatan citra perusahaan tersebut (sering tidak berjalan).

Sehingga sudah seharusnya pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menjadi efektif ketika Sarana dan Prasarana penegakan hukumnya sudah memenuhi baik dari segi SDM yang ada di Bea dan Cukai yang menjalankan secara professional dengan terus meningkatkan kemampuan melalui *capacity building* dan juga adanya reward terhadap pengusaha yang sudah mematuhi aturan cukai yang baru, serta adanya transparansi dan layanan mandiri bagi pengusaha rokok untuk dapat mengetahui batasan tarif HJE.

B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menghambat Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara

Faktor-Faktor Yang Dapat Menghambat Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara menurut Kepala Bagian Kepabeanan

dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II²² yang mana hambatan tersebut ada pada faktor masyarakat, faktor-faktor yang menghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai

Tutupnya perusahaan rokok karena kerugian yang diakibatkan kenaikan tarif cukai menyebabkan tidak optimalnya penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara. Kenaikan Tarif cukai hasil tembakau dengan metode spesifik tidak memperbaiki peningkatan pendapatan yang ada karena bagi pengusaha rokok keadaan tersebut tetap merugi dan menyebabkan mereka tidak mampu memproduksi lagi sehingga menjadi pailit.

2. Beredarnya Cukai Ilegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat

Beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa Cukai di masyarakat adalah salah satu faktor penghambat dalam Efektivitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara dikarenakan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara dan tidak optimalnya Penerimaan keuangan Negara dalam sector Cukai hasil tembakau.

C. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara

²²Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II²³ Sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah masyarakat membeli Cukai Illegal dan juga untuk melihat sejauh mana dampak dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau, apalagi dengan metode spesifik dalam kenaikan harga tembakau ini dapat menekan beredarnya cukai ilegal yang ada di dalam masyarakat.

2. Penindakan terhadap Cukai Illegal dan rokok tanpa cukai

Penindakan terhadap cukai ilegal oleh bea cukai menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II²⁴ yaitu dapat dilakukan penghentian, penyegelan pabrik yang bersangkutan, penyitaan. Bea cukai berwenang untuk menghentikan jika terjadi atau terbukti barang kena cukai tersebut melanggar peraturan di bidang cukai. Saat melakukan tindakan bea cukai wajib menunjukan Surat Perintah Penindakan yang di tanda tangani oleh Dirjen Bea Cukai, Kepala kantor setempat dan pejabat yang menangani pengawasan. Bea cukai mempunyai dua kewenangan yaitu

²³Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

²⁴Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

kewenangan umum berupa penghentian, pemeriksaan, pengenaan denda, pencabutan, dan pembekuan izin usaha. Serta kewenangan khusus yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cukai.

Denda sendiri termasuk penindakan administratif yang bertujuan untuk menghasilkan efek jera. Dalam pengenaan denda harus dilampiri dengan SPPSA (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi) oleh kepala kantor yang disetujui oleh Dirjen bea cukai. Ada macam-macam kategori denda yang diatur dalam peraturan bea cukai. Pelanggaran tidak membuat pembukuan pada saatnya didenda Rp 50.000.000. cukai ilegal denda paling sedikit Rp. 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. pelanggaran pengusaha rokok yang melekatkan pita cukai palsu denda paling sedikit dua kali nilai cukai paling banyak sepuluh kali nilai cukai. Pelanggaran menghalang-halangi bea cukai dalam melakukan pemeriksaan denda paling sedikit Rp 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. tindak pidana cukai palsu penjara paling singkat 1 tahun paling lama 8 tahun. Pidana denda sepuluh kali nilai cukai dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai.

Bea cukai melakukan pemeriksaan berkala terhadap pabrik penyimpanan barang kena cukai merupakan tugas rutin atau apabila terjadi dugaan pelanggaran oleh pabrik tersebut. Cara yang dilakukan Bea dan Cukai adalah meminta catatan kesediaan barang dan dokumen cukai yang wajib diserahkan setiap pemeriksaan. Bea dan Cukai juga meminta keterangan baik kepada pengusaha pabrik maupun karyawan apakah terjadi pelanggaran di perusahaan tersebut.

Di dalam Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II terdapat Unit khusus penindakan cukai ilegal yang di dalamnya terdapat seksi intelejen dan penindakan serta seksi penyidikan dan penindakan (P2).

Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II mengetahui adanya cukai ilegal dari laporan pemeriksaan harian yang dilakukan BC secara rutin dan berkala. Depkeu juga melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok namun tidak menyeluruh dan tidak berkala. Jika Depkeu menemukan suatu pelanggaran maka depkeu melakukan penyerahan atas dugaan pelanggaran cukai kepada BC. Lalu BC yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti ada pelanggaran maka BC yang membuat berita acara mengenai terjadinya tindak pidana cukai.

3. Audit Perusahaan Rokok

Tujuan audit sendiri menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II²⁵ adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha tembakau dalam pelaksanaan undang-undang cukai dan peraturan pelaksanaannya.

4. Pengawasan

Upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah melakukan pengawasan dan keamanan tapi juga melalui kebijakan salah satunya mencegah perusahaan rokok memecah usahanya demi menghindari adanya kewajiban pembayaran lebih tinggi, mempertimbangkan

²⁵Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

batasan produksi dan HJE. Membatasi produsen rokok agar memudahkan pengawasan.

Kesimpulan

Di dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dirasa kurang efektif karena dilihat dari empat teori efektifitas yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hanya dari faktor sarana dan prasarana saja yang cukup efektif. Ketiga faktor yang lain masih belum efektif.
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara yaitu:
 - a. Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai
 - b. Beredarnya Cukai Illegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapankenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi
 - b. Penindakan terhadap Cukai Illegal dan rokok tanpa cukai
 - c. Audit Perusahaan Rokok

d. Pengawasan

Saran

Saran yang bisa diberikan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan Kenaikan Tarif cukai hasil tembakau seharusnya tidak hanya melakukan sosialisasi kepada Pengusaha Rokok tetapi melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
2. Dalam melakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga harus mempertimbangkan kemampuan produsen rokok, karena tidak semua produsen rokok mampu melaksanakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, sehingga hal ini menimbulkan tidak optimalnya penerimaan keuangan Negara dari sektor cukai hasil tembakau dikarenakan beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai.
3. Pengawasan terhadap perusahaan rokok seharusnya dilakukan secara rutin dan terpadu untuk mencegah adanya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anshari, Tunggul. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia

Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung:
Refika Aditama

Effendi, Lutfi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia.

Handayadingrat, Soewono. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi
dan Manajemen*, Bandung: Alumni

Sihaloho, Cyrus. 1996. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung:
Alumni

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Surono. 2013. *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Jakarta: Widyaiswara
Pusdiklat Bea dan Cukai

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Hukum

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali

Kommarudin. **Kamus Besar Riset**, Bandung: Airlangga

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tarif Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai
Hasil Tembakau

Internet

<http://zulhunain.blogspot.com>

<http://blog.usu.ac.id>

<http://www.beacukai.go.id>

<http://www.slideshare.net/mohamadbahrul/apbn-dan-apbd>

<http://www.malang-post.com/ekonomibisnis/69850-cukai-rokok-hasilkan-rp-50t>

http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606071

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mewujudkan-keuangan-negara-yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel>

